

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Ketimpangan pendapatan merupakan isu yang tidak hanya menjadi perhatian global, tetapi juga menjadi tantangan serius di tingkat nasional, termasuk di Indonesia. Ketimpangan ini mencerminkan distribusi hasil pembangunan yang belum merata, di mana pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan pemerataan kesejahteraan. Berbagai laporan menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara kelompok berpenghasilan rendah tertinggal secara ekonomi. Kondisi ini juga tercermin dalam konteks daerah, salah satunya kawasan Mataraman di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari tujuh kabupaten dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Berdasarkan hasil analisis data panel, penelitian ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai sejumlah faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di kawasan Mataraman, Jawa Timur, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Variabel pendidikan yang diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan Mataraman, Jawa Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah yang tidak merata antar kelompok masyarakat justru berpotensi memperbesar ketimpangan pendapatan. Pendidikan yang seharusnya berperan sebagai instrumen pemerataan ekonomi dapat menjadi faktor yang memperkuat kesenjangan apabila akses dan kualitasnya hanya dinikmati oleh kelompok sosial

tertentu. Hasil ini selaras dengan pendekatan teori Human Capital dan dinamika kurva Kuznets, yang menekankan bahwa pada tahap awal pertumbuhan, peningkatan pendidikan belum selalu disertai dengan distribusi manfaat yang merata. Oleh karena itu, upaya peningkatan pendidikan perlu diimbangi dengan pemerataan akses dan mutu di seluruh wilayah agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan.

2. Variabel kesehatan yang diukur melalui Angka Harapan Hidup (AHH) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan Mataraman, Jawa Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan angka harapan hidup berkontribusi terhadap penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Semakin baik kondisi kesehatan masyarakat, semakin merata pula akses terhadap peluang ekonomi di berbagai kelompok sosial. Dengan demikian, pembangunan sektor kesehatan yang merata dapat berperan sebagai instrumen penting dalam mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil. Efektivitas dampak positif ini akan semakin kuat apabila pemerataan tenaga medis, fasilitas layanan, dan infrastruktur kesehatan antardaerah dapat ditingkatkan secara lebih seimbang dan berkelanjutan.
3. Variabel PDRB per kapita memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan Mataraman, Jawa Timur. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi tercermin dari peningkatan pendapatan per kapita, manfaatnya belum dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ketidakseimbangan distribusi hasil pembangunan antarwilayah atau kelompok pendapatan menjadi faktor yang menyebabkan PDRB per kapita belum mampu memberikan kontribusi yang kuat dalam menurunkan ketimpangan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu disertai dengan kebijakan pemerataan yang komprehensif agar dapat memberikan dampak nyata terhadap keadilan distribusi pendapatan.

4. Variabel Tingkat Pengangguran yang diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki arah hubungan negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan Mataraman, Jawa Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran beriringan dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Namun, penurunan tersebut tidak mencerminkan perbaikan kondisi kelompok berpendapatan rendah, melainkan disebabkan oleh stagnasi atau penurunan pendapatan pada kelompok atas. Dengan demikian, hasil ini tidak dapat diartikan sebagai bentuk pemerataan yang ideal, melainkan sebagai indikasi bahwa distribusi pendapatan yang lebih merata dapat terjadi melalui penurunan kesejahteraan kelompok atas, bukan peningkatan kesejahteraan kelompok bawah.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di kawasan Mataraman tidak semata disebabkan oleh rendahnya pencapaian indikator sosial ekonomi, tetapi lebih dipengaruhi oleh ketidakmerataan distribusinya antar wilayah dan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, strategi kebijakan pemerataan ekonomi perlu diarahkan pada perluasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, penguatan kapasitas ekonomi lokal, serta pertumbuhan ekonomi

yang inklusif dan merata, agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, upaya pengurangan ketimpangan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan indikator makro, tetapi harus disertai dengan pemerataan distribusi manfaat pembangunan antar kelompok dan wilayah, agar pertumbuhan yang terjadi benar bersifat inklusif.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi bagi kalangan akademisi dan pemangku kebijakan dalam upaya mengatasi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di kawasan Mataraman, Provinsi Jawa Timur.

1. Pentingnya memprioritaskan strategi pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, terutama di wilayah dengan infrastruktur pendidikan yang tertinggal. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan menengah dan tinggi secara merata, guna memastikan bahwa manfaat pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, bukan hanya oleh kelompok sosial-ekonomi tertentu.
2. Pentingnya memperluas cakupan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas secara merata, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Langkah ini penting untuk meningkatkan angka harapan hidup dan memperkecil ketimpangan kesejahteraan antarwilayah.
3. Transformasi tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal yang lebih produktif perlu difasilitasi melalui penyediaan pelatihan berbasis kebutuhan industri dan peningkatan keterampilan kerja. Pemerintah juga perlu mendorong

peran strategis UMKM dalam penciptaan lapangan kerja, serta memberikan akses terhadap pembiayaan dan pasar, agar distribusi pendapatan dapat lebih merata dan berkelanjutan di tingkat lokal.

4. Pemerintah daerah perlu mendorong strategi pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka PDRB per kapita, tetapi juga menjamin pemerataan hasil pembangunan antar kabupaten/kota. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan konektivitas antarwilayah, pemerataan investasi infrastruktur, serta peningkatan akses kelompok berpendapatan rendah terhadap sumber daya produktif. Pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berbasis potensi lokal penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi langsung terhadap penurunan ketimpangan pendapatan.